

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori

2.1.1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil, atau suatu hal yang sedang dilakukan berhasil tercapai dengan baik. Efektivitas diambil dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan. Efektivitas kerap berkaitan dalam hubungan antara apa yang diinginkan dengan apa yang sudah diraih. Menurut Effendy (1989,14) efektivitas merupakan komunikasi dalam proses meraih tujuan yang telah disusun sesuai rencana dengan jumlah personal yang ditentukan, biaya yang dianggarkan, dan waktu yang sudah ditetapkan.

Konsep efektivitas yang disampaikan oleh pakar manajemen dan organisasi mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Stoner (1982, 112) menyebutkan efektivitas itu penting dalam suatu organisasi untuk memperoleh tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah tanda dari keberhasilan dalam suatu organisasi. Miller (1977, 292), mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud menjadi tingkat untuk melihat sejauh mana suatu sistem sosial untuk memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas berbeda dengan efisiensi, efisiensi memiliki arti perbandingan hasil dan biaya, sedangkan efektivitas merupakan pencapaian suatu tujuan.

Efektivitas menurut Kurniawan (2005, 109) merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk melakukan fungsi dan tugas operasi kegiatan program atau misi dalam suatu organisasi yang tidak terdapat tindasan dalam perwujudannya. Sedangkan menurut Mahmudi (2005, 92), efektivitas berarti hubungan antara tujuan dan output, bertambah banyak sumbangan output kepada perwujudan tujuan, maka semakin efektiflah organisasi dan program atau pekerjaan yang dijalankan.

Dari beberapa gagasan para ahli di atas mengenai efektivitas, bisa diketahui bahwasannya konsep efektivitas bermacam ragam sesuai dengan masing-masing ilmu yang dipunya. Tetapi memiliki tujuan efektivitas yaitu agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Mengukur efektivitas organisasi tidak merupakan hal yang sangat mudah, karena efektivitas bisa dipelajari dari beberapa sudut pandang serta bergantung pada siapa yang akan menafsirkan serta menilainya. Menurut beberapa ahli, terdapat jenis pendekatan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan penting disampaikan agar dimanfaatkan menjadi dasar dalam pengukuran efektivitas.

Steers (1985, 206) menyampaikan lima kriteria untuk pengukuran efektivitas yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi
3. Kepuasan kerja
4. Pencarian sumber daya
5. Kemampuan berlabar

Makmur (2011,7) mengemukakan beberapa segi kriteria efektivitas yaitu:

- a. Ketepatan Waktu

Penggunaan waktu secara tepat akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Maka dari itu, ketepatan waktu sangat diperlukan agar tercapainya efektivitas.

- b. Ketepatan Perhitungan Biaya
Ketepatan perhitungan biaya artinya penggunaan pembiayaan tak mengalami kelebihan dan tak mengalami kekurangan pembiayaan hingga program yang direncanakan dapat terlaksanakan dan terselesaikan sesuai tujuan.
- c. Ketepatan Dalam Pengukuran
Kegiatan yang dilaksanakan suatu organisasi pastinya memiliki ukuran, guna menentukan porsi pendukung yang akan digunakan.
- d. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan
Menetapkan suatu pilihan bukanlah hal yang gampang dalam sebuah organisasi dan juga melalui tahap-tahap proses, sehingga bisa ditemukan penetapan yang terbaik menurut organisasi.
- e. Ketepatan Berfikir
Ketepatan dalam berfikir akan memperoleh suatu tujuan yang sudah ditentukan sehingga terciptalah keefektifan disuatu organisasi.
- f. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah
Kemampuan pemimpin dalam organisasi amat diperlukan agar tercapainya keberhasilan dalam suatu organisasi, seperti kemampuan untuk menyampaikan tugas yang mudah dipahami dan jelas untuk dimengerti oleh bawahan.
- g. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan
Tujuan yang ditetapkan dengan jelas dapat mendukung program dalam organisasi, adanya maksud dan tujuan yang jelas maka proses dalam mencapai tujuan dapat lebih tertuju dan bisa dilaksanakan dengan mudah sehingga efektivitas dapat tercapai.
- h. Ketepatan Sasaran
Terkandung sasaran yang mempunyai sifat untuk bisa digunakan dalam jangka panjang dan jangka pendek . Suatu organisasi harus mampu memilih sasaran dalam jangka waktu yang tepat.

Duncan (dalam Steers 2008, 53) mengemukakan ukuran efektivitas yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan usaha organisasi untuk memperoleh tujuannya dan wajib untuk dilihat sebagai sebuah proses. Pentahapan diperlukan agar pencapaian tujuan akhir dapat terjamin. Baik itu pentahapan pencapaian dalam bagiannya ataupun dalam artian periodisasinya.
- b. Integrasi
Integrasi adalah mengukur tingkat keahlian dalam suatu organisasi untuk melakukan komunikasi ataupun sosialisasi dengan beraneka

ragam organisasi lain yang ada, serta merupakan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut pada proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah suatu keahlian yang dimiliki organisasi untuk menepatkan dirinya kepada lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, digunakanlah sistem pengisian dan pengadaan karyawan atau pegawai sebagai tolak ukurnya.

Peneliti menggunakan teori Duncan untuk meneliti ukuran efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari. Teori ini digunakan karena berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut.

2.1.2. Pemerintahan Desa

Kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang diberikan imbuhan pem- dan -an. Menurut Poerwadarmita (2006, 141) makna kata perintah, pemerintah dan pemerintahan mengandung arti yaitu:

1. Perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah merupakan organisasi tertinggi yang memerintah di suatu negara.
3. Pemerintahan ialah suatu pengelolaan tata pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi yang sebanding dan saling berkaitan untuk memperoleh maksud dan tujuan negara itu sendiri.

Pemerintahan desa menurut Maria (2006, 111) bahwa pemerintahan desa merupakan suatu proses dimana upaya-upaya masyarakat desa yang bersangkutan digabungkan dengan upaya-upaya pemerintah agar dapat mengembangkan tingkat kehidupan masyarakat.

Sementara HAW. Widjaja (2003, 3) mengungkapkan pemerintahan desa adalah subsistem yang berasal dari sistem pelaksanaan pemerintah, hingga desa

memiliki wewenang dalam hal mengurus serta mengatur kebutuhan masyarakat desanya. Kades memiliki tanggung jawab pada Badan Permusyawaratan Desa dan memberikan laporan dari pelaksanaan tersebut pada Bupati.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami arti pemerintahan desa yaitu merupakan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Sementara BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa bersama membentuk, merancang dan menyusun peraturan desa serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat bersama kepala desa.

Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menyebutkan bahwa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang desa tersebut, fungsi yang melekat pada jabatan kepala desa tidak hanya menjalankan pemerintahan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seorang kepala desa harus mempunyai kemampuan leadership yang kuat, mampu mengayomi dan terbuka agar proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pada saat menjalankan pemerintahan, kepala desa berhak untuk mengangkat perangkat desa menurut UU Desa Pasal 48 yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, serta pelaksana teknis. Perangkat desa merupakan warga desa yang memenuhi syarat berdasarkan, yaitu

- a. Memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- b. Minimal mempunyai usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum diadakannya pendaftaran; dan

Hak dan wewenang yang melekat pada jabatan kepala desa demikian luas dalam menentukan nasib desa dan masyarakat desa. disatu sisi jika hak dan kewajiban tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran desa dan masyarakatnya akan terwujud. Sebaliknya, jika hak dan kewenangan tersebut digunakan semena-mena maka akan berdampak pada semakin terpuruknya kondisi desa dan masyarakat. Oleh karenanya dalam menjalankan hak dan kewenangannya sebagai pemimpin pemerintah desa, selain kewajiban dan larangan yang diatur peraturan dan perundangan harus ditaati, kepala desa dalam menjalankan fungsinya didampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya. BPD merupakan lembaga yang menjalankan peran pemerintahan dan di dalamnya terdapat anggota yang merupakan wakil dari warga desa setempat berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Didalam penelitian, hasil penelitian yang relevan merupakan salah satu bagian terpenting. Hasil penelitian yang relevan didalam penelitian merupakan sebuah hasil penelitian yang serupa yang dapat digunakan oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam penulisan penelitiannya. Peneliti menjabarkan dua

penelitian yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan penelitiannya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2017) yang berjudul “Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang” dengan menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas organisasi dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Sampang. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Baria (2019) yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Kartu Macca di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng” dengan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dari pelayanan Kartu Macca di Kecamatan Lalabata. Peneliti memilih kedua skripsi ini untuk dijadikan sebagai hasil penelitian yang relevan karena kedua skripsi ini membahas mengenai efektivitas.

Berikut ini akan dijabarkan lebih jelas mengenai kedua penelitian tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Uraian	Metodologi
1.	Sri Wahyuni (2017)	<p>Judul: Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang</p> <p>Latar Belakang: Permasalahan yang ditemukan bahwa di Kecamatan Sampang banyak masyarakat yang mengalami kekecewaan mengenai kecepatan dan kurang keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan: Untuk mengetahui efektivitas organisasi dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Sampang</p> <p>Teori: Richard M. Steers (1985,53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi</p> <p>Hasil: Efektivitas organisasi dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Sampang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat pada indikator pencapaian tujuan dan integrasi. Sedangkan untuk indikator adaptasi belum sesuai dengan keinginan masyarakat.</p>	<p>Metode Penelitian: Metode Kualitatif</p> <p>Teknik Pengumpulan Data: Observasi langsung dan wawancara</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis kualitatif secara deskriptif</p> <p>Lokasi Penelitian: Kecamatan Sampang</p>

		<p>Persamaan: Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai efektivitas dan merupakan penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan: Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terlihat pada objek, lokasi penelitiannya, dan hasil penelitian.</p>	
2.	Khaerul Baria (2019)	<p>Judul: Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng</p> <p>Latar Belakang: Dari program Kartu Macca yang dirasakan masyarakat, masih kurang mengetahui bantuan manfaat lainnya yang ada didalam Kartu Macca, sehingga pemerintah harus memperhatikan serta meningkatkan pemahaman masyarakat.</p> <p>Tujuan: Untuk mengetahui bentuk pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dari pelayanan Kartu Macca di Kecamatan Lalabata.</p> <p>Teori: Richard M. Steers (dalam Tangkilian 2005)</p> <p>Hasil: Efektivitas pelayanan Kartu Macca Kecamatan Lalabata belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena masih belum</p>	<p>Metode Penelitian: Metode Kualitatif</p> <p>Teknik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, studi perpustakaan, dokumentasi.</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi.</p>

		<p>konsisten dan waktu penyaluran belum tepat.</p> <p>Persamaan: Persamaannya yaitu merupakan penelitian kualitatif dan meneliti mengenai efektivitas.</p> <p>Perbedaan: Terdapat pada objek dan lokasi penelitiannya.</p>	<p>Lokasi Penelitian:</p> <p>Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng</p>
--	--	--	--

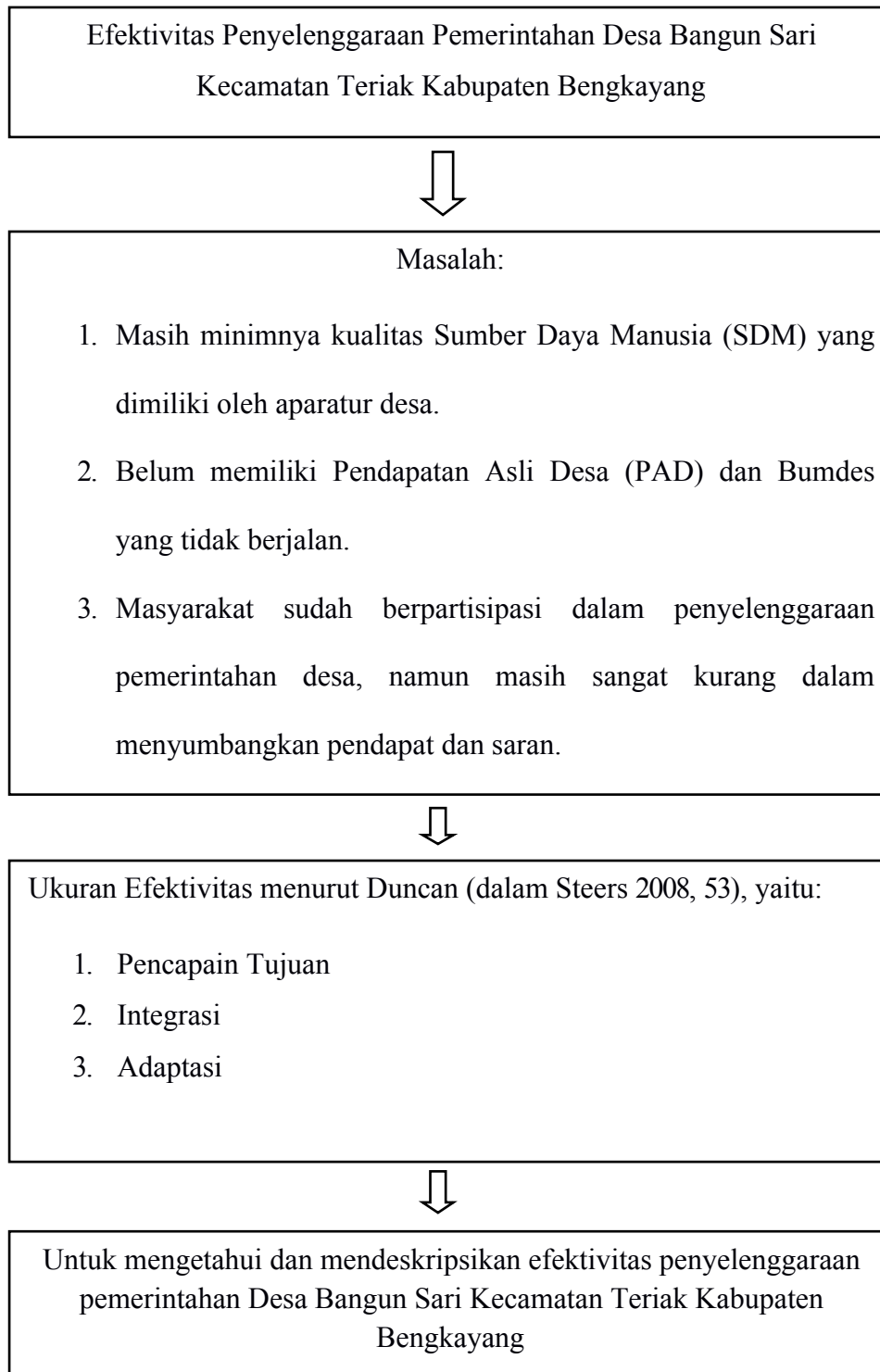
Sumber: Peneliti 2022

2.3. Alur Pikir Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya. Dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa, belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak berjalan, dan masyarakat yang masih sangat kurang dalam menyumbangkan pendapatnya. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari maka peneliti menggunakan teori Duncan untuk mengukur keefektifan penyelenggaraan pemerintahannya yaitu Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai alur pikir penelitian ini, maka dapat dilihat pada kerangka pikir yang ada dibawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian



2.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi pertanyaan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan pemerintah desa Bangun Sari dalam proses pencapaian tujuan pemerintahannya?
2. Bagaimana pemerintah desa Bangun Sari melakukan integrasi terhadap organisasi lain?
3. Bagaimana pemerintah desa Bangun Sari melakukan adaptasi terhadap lingkungannya?